



UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
FAKULTAS EKONOMI  
JAKARTA

SKRIPSI

PROSES PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK DENGAN  
MENGGUNAKAN SURAT PAKSA DEMI MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK di KPP PRATAMA JAKARTA KALIDERES

DIAJUKAN OLEH:

NAMA : DANNY  
NIM : 125070144

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MENCAPAI GELAR SARJANA EKONOMI

2011

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus atas segala berkat dan rahmat yang diberikan karena skripsi yang disusun dapat diselesaikan tepat waktu sehingga dapat memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara di Jakarta.

Skripsi ini tidak akan mungkin dapat diselesaikan tanpa orang-orang yang sudah memberikan kontribusi dalam pengerjaan skripsi ini. Oleh sebab itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Nazmel Nazir, MBA., Ak, selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan untuk meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan petunjuk, bimbingan dan pengarahan yang sangat bermanfaat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Sukrisno Agoes, Ak., M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara
3. Ibu Dra. Nurainun Bangun, M.M., Ak, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara.
4. Seluruh Dosen pengajar, Staff Pengajar, Staff Perpustakaan, dan Karyawan Universitas Tarumanagara yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan.

5. Seluruh Pejabat dan Staff KPP Pratama Jakarta Kalideres terutama Bapak Tri, selaku Kepala Seksi Penagihan yang telah banyak membantu saya untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini.
6. Keluarga besar penulis yang tercinta Papa, Mama yang telah memberikan dukungan dukungan baik secara moril dan materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
7. Teman- teman sesama bimbingan yang telah banyak membantu dan saling memberikan semangat selama masa pembuatan skripsi ini.
8. Semua pihak yang telah ikut memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu penulis dengan tangan terbuka bersedia menerima kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna melengkapi skripsi ini agar menjadi lebih baik. Terima Kasih atas perhatian yang diberikan.

Jakarta, 10 Januari 2010

Danny

## DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR.....** ..... **i**

**DAFTAR ISI.....** ..... **iii**

**DAFTAR GAMBAR.....** ..... **vii**

**DAFTAR TABEL.....** ..... **viii**

**DAFTAR LAMPIRAN.....** ..... **ix**

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Pembatasan Masalah.....	5
D. Perumusan Masalah.....	6
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
F. Sistematika Pembahasan.....	7

### **BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

A. Kerangka Teori.....	10
1. Pajak.....	10
a. Pengertian Pajak.....	10
b. Sejarah Perkembangan Pajak.....	12

c. Fungsi Pajak.....	14
d. Jenis Pajak.....	16
e. Tata cara Pemungutan Pajak.....	17
 2. Wajib Pajak.....	22
a. Pengertian Wajib Pajak.....	22
b. Wajib Pajak Patuh.....	23
c. Kepatuhan Pajak.....	25
d. Hak Wajib Pajak.....	26
e. Kewajiban Wajib Pajak.....	27
 3. Penagihan Pajak.....	28
a. Pengertian Penagihan Pajak.....	28
b. Dasar Hukum Penagihan Pajak.....	29
c. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Ketentuannya.....	35
  B. Kerangka Pemikiran.....	47
1. Identifikasi Variabel.....	47
2. Definisi Variabel.....	47

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Pemilihan Obyek Penelitian .....	50
B. Teknik Pengumpulan Data.....	51
C. Sumber Data.....	53
D. Teknik Pengolahan Data.....	53

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	55
1. Sejarah Singkat dan Perkembangan KPP Pratama Jakarta Kalideres.....	55
2. Struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Kalideres.....	56
3. Tugas Pokok KPP Pratama Kalideres.....	61
B. Analisis dan Pembahasan	
1. Analisis Penyebab Terjadinya Tunggakan di KPP Pratama Jakarta Kalideres....	62
2. Analisis Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di KPP Pratama	
Kalideres.....	64
a. Penerbitan Surat Teguran.....	68
b. Pelaksanaan Surat Paksa.....	71
c. Pelaksanaan Penagihan dengan SPMP/Penyitaan.....	76
d. Pengumuman dan Pelaksanaan Lelang.....	77
3. Analisis Efektifitas Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksadalam	
Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kalideres.....	81
4. Masalah yang dihadapi dalam melakukan Penagihan Pajak.....	84
a. Permasalahan intern.....	84

b. Permasalahan ekstern.....	85
------------------------------	----

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **LAMPIRAN**

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran.....	49
Gambar 4.1	Struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Kalideres.....	57

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1 Laporan Kegiatan Penagihan Pajak Tahun 2008 dan 2009.....	66
Tabel 4.2 Laporan Kegiatan Penagihan Pajak Yang Dapat Dicairkan Tahun 2008 dan 2009....	67
Tabel 4.3 Analisis Perbandingan Surat Teguran yang diterbitkan dengan Surat Teguran yang dapat dicairkan untuk Tahun Anggaran 2008.....	69
Tabel 4.4 Analisis Perbandingan Surat Teguran yang diterbitkan dengan Surat Teguran yang dapat dicairkan untuk Tahun Anggaran 2009.....	70
Tabel 4.5 Analisis Perbandingan Surat Paksa yang diterbitkan dengan Surat Paksa yang dapat dicairkan untuk Tahun Anggaran 2008.....	74
Tabel 4.6 Analisis Perbandingan Surat Paksa yang diterbitkan dengan Surat Paksa yang dapat dicairkan untuk Tahun Anggaran 2009.....	75
Tabel 4.7 Laporan kegiatan Penagihan Tunggakan Pajak.....	80

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
- Lampiran 2 Formulir-Formulir yang digunakan dalam proses pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Seperti yang sudah kita ketahui bersama, pemerintah berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Namun disamping itu sangat diperlukan partisipasi yang aktif dari seluruh warga negaranya untuk ikut serta dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang diinginkan baik oleh pemerintah maupun rakyatnya. Dengan kata lain, diperlukan suatu kerja sama yang baik antara pihak pemerintah dengan rakyatnya untuk mewujudkan suatu kesejahteraan masyarakat yang diinginkan oleh seluruh pihak.

Dalam merealisasikan hal tersebut, negara (pemerintah) tidak mungkin terlepas dari adanya kebutuhan atas pembiayaan dan pendanaan. Sumber dana yang diperoleh negara (pemerintah) dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti pinjaman luar negeri, sector migas maupun non migas. Namun dengan keadaan dan kondisi Indonesia sekarang ini di tengah krisis yang melanda, maka sumber dana yang dapat diperoleh seperti pinjaman dari negara lain sangatlah tidak mungkin untuk diandalkan terus-menerus.

Oleh karena itu, maka pemerintah sangat berupaya untuk memaksimalkan suatu sumber dana yang dapat diperoleh dari dalam negeri yang paling berpotensial untuk mendapatkan suatu sumber dana yang besar untuk memenuhi kebutuhannya. Dan aspek yang paling berpotensial itu adalah dari sektor perpajakan. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah kepada segenap rakyatnya pada hakekatnya adalah suatu pengabdian rakyat/warga negara terhadap negaranya. Seorang warga negara yang baik haruslah menyadari kewajibannya untuk membayar pajaknya sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku yang ditetapkan oleh negaranya.

Peranan pajak dalam pembangunan negara tidak perlu diragukan lagi. Pajak merupakan komponen yang paling penting dalam penerimaan negara, untuk itu diperlukan suatu kebijakan agar penerimaan pajak dapat ditingkatkan.

Untuk memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak, maka pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menyederhanakan pemungutan pajak, menurunkan tarif pajaknya, mengubah sistem pemungutan pajak dari official assessment system menjadi self assessment system. Self assessment system adalah suatu sistem yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak.

Inti dari perubahan sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah untuk memberikan keleluasaan dan kebebasan terhadap Wajib Pajak dalam rangka membayar pajak terhadap negara. Wajib Pajak dianggap mampu untuk menghitung pajaknya sendiri, mampu untuk memahami undang-undang perpajakan yang berlaku, serta dianggap memiliki kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti penting untuk membayar pajak. Jadi pada saat sekarang ini, Wajib Pajak lah yang memiliki peran dominan. Namun yang menjadi masalahnya saat sekarang ini adalah apakah Wajib Pajak itu sudah jujur untuk menghitung, menyetor, serta melaporkan pajaknya.

Di dalam realita yang sebenarnya, masih sering sekali dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya hutang pajak sebagaimana mestinya. Perlu sekali untuk dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa terhadap tunggakan pajak tersebut.

Kepatuhan pajak (tax compliance) dapat diartikan bahwa Wajib Pajak memiliki kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang

berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Kepatuhan membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak.

Pelaksanaan untuk memaksimalkan penerimaan pajak dapat dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan terhadap wajib pajak, melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang memiliki indikasi cukup kuat belum melaporkan objek pajaknya, mengadakan perbaikan dan penyempurnaan peraturan yang berlaku serta melakukan penagihan secara aktif terhadap Wajib Pajak melalui penagihan dengan surat paksa yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyitaan dan pelelangan asset Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan penelitian untuk membahas dan mengkaji lebih lanjut mengenai proses penagihan pajak dengan menggunakan surat paksa terhadap penerimaan pajak di KPP PRATAMA JAKARTA KALIDERES dalam bentuk skripsi dengan judul :

PROSES PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK DENGAN MENGGUNAKAN SURAT PAKSA DEMI MEMAKSIMALKAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK di KPP PRATAMA JAKARTA KALIDERES

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Pada realita dan kenyataan yang sebenarnya Wajib Pajak masih sering atau cenderung untuk menghindari pembayaran pajak terhadap negara.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Penelitian yang dilakukan dibatasi hanya pada masalah-masalah yang berkaitan dengan pengaruh surat paksa terhadap penerimaan pajak di KPP PRATAMA KEMBANGAN, Jakarta Barat. Hal ini dikarenakan keterbatasan penulis seperti waktu, tenaga dan biaya yang tersedia.

### **1.4 Perumusan Masalah**

Berdasarkan hal-hal yang telah diungkapkan maka perumusan masalah dalam penelitian ini, adalah : a) Bagaimanakah prosedur pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa di KPP Pratama Kembangan, Jakarta Barat; b) Apakah pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa yang dilakukan oleh KPP PRATAMA KEMBANGAN, Jakarta Barat sudah efektif; c) Kendala apa saja yang dihadapi dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di KPP PRATAMA KEMBANGAN, Jakarta Barat.

### **1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian adalah: a) untuk menganalisa prosedur pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa di KPP PRATAMA JAKARTA KALIDERES; b) untuk mengetahui pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa di KPP PRATAMA JAKARTA KALIDERES apakah sudah efektif; c) untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di KPP PRATAMA JAKARTA KALIDERES

## **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang di harapkan dalam penulisan skripsi ini adalah : a) bagi penulis, untuk meningkatkan dan menambah ilmu pengetahuan tentang prosedur pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa, b) bagi KPP, agar dapat memberikan saran-saran yang bermanfaat untuk kinerja KPP dalam menjalankan tugas dan fungsinya di kemudian hari, c) bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya dan sebagai acuan dasar dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

### **1.6 Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai hal-hal yang akan diuraikan dalam skripsi ini secara keseluruhan, yaitu:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan masalah latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

Bab ini membahas mengenai pengertian dan tinjauan umum tentang pajak, prosedur penagihan pajak dan mekanisme penagihan pajak dengan surat paksa.

### **BAB III            METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini membahas mengenai pemilihan obyek penelitian, teknis pengumpulan data dan teknik pengolahan data.

### **BAB IV            HASIL PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang sejarah, dan perkembangan serta visi dan misi KPP PRATAMA JAKARTA KALIDERES, struktur organisasi dan uraian tugas, proses yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti, serta analisis dan pembahasan terhadap objek penelitian berdasarkan perumusan masalah-masalah yang telah dibuat.

### **BAB V            KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan disertai dengan saran-saran yang sekiranya bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Aryanto, Fitriandi, Priyono (2010). *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*. Jakarta: Salemba Empat

Departemen Keuangan Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak. *Pedoman Penagihan Pajak 2009*

Himpunan Peraturan Perundang-undangan. *Pengadilan Pajak dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa* (2010). Fokusmedia

Mardiasmo (2009) *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta : Andi Offset

Munawir. (2000). *Perpajakan*. Cetakan empat. Yogyakarta : Liberty

Republik Indonesia, Undang-undang nomor 19 tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Resmi, Siti. (2007). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi lima. Jakarta : Salemba Empat

Sukrisno Agoes & Estralita Trisnawati (2009). *Akuntansi Perpajakan*. Edisi dua. Jakarta : Salemba Empat

Waluyo & Wirawan B. Ilyas. (2008). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat